



ETIKA POLITIK SEBAGAI JALAN PENYEMPURNAAN HUMANISME RELIJIUS

Muhammad Danil

STAIN Mandailing Natal

mdanil@stain-madina.ac.id

Melia Rosa

UIN Imam Bojol Padang,

meliarosaocha@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.4010>

Abstract

The ethics of a politician are a necessity to pay attention to in perfecting religious humanism in the world of politics so that it can produce policies that support a prosperous and prosperous society. However, so far what we have encountered has only been limited to campaigning in the stage of gaining the most votes. The speakers related to political ethics, religious ethics, and the relationship between religion and politics have been discussed by figures such as Al Farabi, Ibnu Taymiyah, Miroljub Jevtic, Anthony Gill and others. Therefore, research like this should continue to be carried out so that the results will have a positive impact on politics and our society in the future.

Research related to ethics was carried out using library research where the sources were taken from materials that focused on highlighting ethics, politics and religion with a data processing process that went through several stages starting with data coding and ending with drawing conclusions. The results of this research determine that the ethics that must be present in a politician to perfect his religious humanism are related to justice, honesty, responsibility, and broad knowledge which are crucial to the formation of a prosperous and prosperous society which can give birth to a civilization of high value.

Keywords: *Politics, Religion, Humanism*

Abstrak:

Etika seorang politikus merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian dalam menyempurnakan humanisme keagamaan dalam dunia politik sehingga mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mendukung masyarakat sejahtera dan sejahtera. Namun selama ini yang kita jumpai hanya sebatas berkampanye dalam tahap perolehan suara terbanyak. Pembicara terkait etika politik, etika agama, dan hubungan agama dengan politik pernah dibahas oleh tokoh-tokoh seperti Al Farabi, Ibnu Taymiyah, Miroljub Jevtic, Anthony Gill dan lain-lain. Oleh karena itu, penelitian seperti ini harus terus dilakukan agar hasilnya dapat memberikan dampak positif bagi politik dan masyarakat kita di masa depan.

Penelitian terkait etika dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang sumbernya diambil dari bahan-bahan yang fokus pada penonjolan etika, politik, dan agama dengan proses pengolahan data yang melalui beberapa tahapan yang diawali dengan pengkodean data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menentukan bahwa etika yang harus ada dalam diri seorang politikus untuk menyempurnakan humanisme religiusnya adalah terkait dengan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan pengetahuan yang luas yang sangat penting bagi terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan sejahtera. dapat melahirkan peradaban yang bernilai tinggi.

Kata Kunci: *Politik, Religijs, Humanisme*

PENDAHULUAN

Tahun 2024 mendatang merupakan tahun politik di Indonesia. Ditahun ini pesta demokrasi akan digelar besar besaran.¹ Namun auranya sudah terasa dari sekarang yang semakin hari semakin memanas. Jual beli slogan, buka bongkar aib, sampai pada level saling menyalahkan atas setiap kinerja masa lalu harus ditebar. Polarisasi politik dari tahun ke tahun kita lihat tidak jauh berbeda, cuma aksi balas dendam yang terus menerus harus diwariskan namun yang lebih anehnya semua ini dilakukan oleh kelompok atau orang yang beragama. Sehingga wajar jika ditanya, seperti apa sepantasnya etika politik orang beragama?

Indonesia dengan indeks 96% masyarakat percaya bahwa agama itu penting² dengan penganut agama islam sebagai agama mayoritas. Namun dalam pentas politik keadaan ini cuma terlihat dimasa kampanye dan sesudah itu menghilang. Sehingga asumsi yang muncul bahwa agama tidak memiliki peran terhadap perpolitikan atau memang betul yang dikatakan Nietzsche “bahwa tuhan telah mati” itu benar, semakin modren kehidupan tersebut semakin manusia melepas agama itu sendiri.

Hasil survey World Values Survey bahkan menyebutkan bahwa 70% dari masyarakat dunia mengakui menganut sebuah kepercayaan termasuk Indonesia.³ Hal inipun nampak jelas dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Sehingga ini juga yang melatarbelakangi perlunya mengkajian keterkaitan agama dan politik dalam hal etika terhadap penyempurnaan humaisme religius, sebab sudah pasti pelaku politik itu sendiri adalah orang beragama yang seharusnya menjadikan etika sebagai pertimbangan etis dalam prilaku dan pengambilan kebijakan.

Berita terhangat akhir ini, dimana anggota DPRD Cinta Mega diduga bermain game slot yang merupakan judi online.⁴ Terlepas terbukti atau tidaknya dugaan ini, yang namanya judi merupakan hal yang terlarang apalagi dilakukan oleh orang yang dipercaya sebagai wakil rakyat yang seharusnya sebagai teladan. Namun kejadian ini bukan satu satunya yang kita dengar, dimana sebelumnya kita terusik oleh korupsi BTS kominfo⁵ yang mencapai miliaran dan sebelumnya juga kita dengar kekerasan seksual oleh wakil rakyat yang berinisial BY⁶ Sehingga kalau kita kumpulkan informasi terkait etika para politisi memang membuat kita kecewa, begitu banyak mereka yang terlibat dalam hal hal yang merusak nilai nilai etis seorang politisi yang seharusnya memberikan contoh terbaik ketika menjadi perpanjangan tangan rakyat.

¹ <https://infopemilu.kpu.go.id>

² Pew Research Center.com

³ Ronald F Inglehart, *Religion's Sudden Decline What's Causing It, and What Comes Next* (England: Oxford University Press, 2021). h.233

⁴ <https://megapolitan.kompas.com>

⁵ <https://www.antaranews.com>

⁶ <https://news.republika.co.id>

Kita juga sering menemukan kejanggalan terhadap para politisi yang melanggar etika ini, dimana dalam keseharian mereka digambarkan sebagai orang yang taat beragama bahkan itu dibuktikan dengan telah ikut haji atau umrah berkali kali, namun itu justru tak memberikan dampak terhadap perilaku mereka. Hal inilah yang membuat kita menjadi bertanya mendalam, kenapa etika agama tidak bisa hidup dalam diri politisi yang tergambar taat beragama? apa mungkin keta'atan sebagai seremonial dalam merawat kekuasaan saja.

Padahal kajian terkait etika seorang politis ini sudah mejadi kajian oleh para filsuf dari dahulunya, dimana mereka mengedepankan keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab yang selalu dibahas dari periode periode berikutnya sampai zaman modren. Namun hal ini tetap dan terus terjadi, seperti yang dilakukan oleh politisi Marcon⁷ hal serupa juga dilakukan Rasmus⁸ dalam menghina agama Islam. Artinya persoalan etika ini terjadi hampir disemua wilayah di belahan dunia ini, namun ada yang dominan ada yang tidak. Dan pelakunya rata rata penganut sebuah kepercayaan atau agama. Sehingga hasil penelitian ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat luas dalam menentukan hak politiknya serta bahan renungan bagi para politisi sebagaimana tujuan penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan pada para pemilik hak politik dalam menentukan pilihan yang tepat serta menjadi pertimbangan bagi pala politikus untuk tidak melupakan tujuan hakiki dari ikut berperan dalam percaturan politik yaitu meningkatkan etika religijs mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Dimana sumber utama diambil dari jurnal, buku dan dokumen serta media yang relevan menjadi sumber rujukan. Data tersebut peneliti oleh lewat proses coding, reduksi serta display data sampai melahirkan kesimpulan.⁹

Hasil dan Pembahasan

PERAN AGAMA TERHADAP PRILAKU POLITIK

Sejarah panjang perkembangan agama tidak pernah terlepas dari politik yang selalu mengambil peran signifikan dalam penyebaran agama, mulai dari masa nabi Muhammad dari timur dan penyebaran agama Kristen dari barat. Penyebaran ini menjadi bukti bahwa politik dan agama saling berkelindan. Hal ini senada dengan yang diungkap Charles yang

⁷ <https://www.cnbcindonesia.com>

⁸ <https://www.cnnindonesia.com>

⁹ Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative and Analysis*, second edi (London: Sage Publication inc, 1994).

mengatakan bahwa kebanyakan lembaga atau institusi akan menjadi agama sebagai legitimasi dalam perkembangan lembaga atau institusi tersebut.¹⁰

Realitas perpolitikan, agama sering menjadi kendaraan untuk membawa poling suara terbanyak namun dilupakan oleh sebagian besar politiksi ketika sudah menduduki jabatan politik itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya para politiksi yang harus tidur dalam jeruji besi karena terbukti melakukan korupsi,¹¹ kekerasan, serta pelanggaran hukum lainnya.¹² Berkebalikan dengan harapan yang ditawarkan oleh Anthony, dimana dia mengatakan bahwa makin banyaknya para agamawan masuk ke dalam arena politik akan melahirkan peran yang signifikan terkait agama, bukan untuk melahirkan powerful kaum agama atau membentuk kelompok elit agama.¹³

Ketika kelompok agama ini mampu memasuki arena politik, yang kita harapkan bagaimana kaum agama ini mampu membentuk kebiasaan baru terhadap perilaku para politikus sehingga nilai keagamaan akan terbawa masuk lebih luas sampai berpengaruh pada kebijakan publik. Realitas agama tidak hanya berbicara pada persoalan baik buruk atau halal haram saja, namun juga memberikan sebuah gambaran masyarakat yang ideal. Sehingga agama akan berperan aktif dalam membentuk seperti apa kelompok masyarakat yang akan lahir atau bagaimana tingkatan dalam masyarakat itu sendiri.

Perjalan agama sekarang jika kita amati dari realitas keagamaan masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Hal ini juga kita temui dalam bukti ilmiah dengan makin hari makin banyaknya kelompok keagamaan yang bermunculan. Bahkan di negara yang tidak mengakui agama itu sendiri, justru kelompok agamanya makin inten dalam mempratekan ritual dan kegiatan keagamaan yang mereka jalani walau sering mendapat tekanan dari pemerintahan mereka sendiri.¹⁴

Namun, di sisi lain terkait hubungan politik dan agama, dalam pandangan ahli politik masih menganggap sebelah mata karena disebabkan mereka berkeyakinan semakin majunya suatu peradaban maka agama akan ditinggalkan, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Berlainan dengan Anthony Gill dalam melihat persoalan ini, dia memandang bahwa menyepelakan pengaruh agama terhadap politik adalah sebuah kesalahan sebab semakin hari agama semakin kuat perannya dalam masyarakat, dengan alasan; semakin tumbuhnya peran keagamaan diberbagai belahan dunia. Sehingga tidak memperhatikan hal ini merupakan sebuah kesalahan yang tidak dapat memandang satu indikator penting yang mempengaruhi agama dalam suatu negara. Alasan kedua, para ahli harus semakin memperhatikan kajian

¹⁰ Charles S., *Religion Liebman, Democracy and Israeli Society* (New York: Routledge, 2017).

¹¹ Novance Silitonga, "POTENSI SISTEM PEMILU MEMUNCULKAN PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA," *Jurnal Communitarian* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.231>.

¹² Edi Purwanto, "Peran Ekonomi, Politik, Dan Sosial Dalam Kekerasan Atas Nama Agama," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30648/dun.v4i1.204>.

¹³ Anthony Gill, "Religion and Comparative Politics," *Annual Review of Political Science* 4 (2001), <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.117>.

¹⁴ Andrew Greeley, "A Religious Revival in Russia?," *Journal for the Scientific Study of Religion* 33, no. 3 (1994), <https://doi.org/10.2307/1386689>.

keagamaan ini karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan kajian politik perbandingan.¹⁵ Hubungan antara agama dan politik ini juga dapat kita lihat dari proses revolusi Iran,¹⁶ bangkitnya Taliban di Afganistan, India, Polandia, dan banyak lagi negara yang dapat kita temui ada pengaruh agama dalam perpolitikan negaranya.

Pola pola perkembangan keagamaan yang terus bergerak ini memperlihatkan bagaimana proses mobilisasi massa mereka. Proses pengendalian massa inilah yang mempengaruhi pergerakan politik. Beberapa tahun terakhir ini, persoalan agama yang mulai banyak dapat sorotan oleh para ahli yaitu hubungan antara fundamentalis agama dengan demokrasi. Persoalan seperti ini diindonesia termasuk yang dominan sebab bererapa tokoh bangsa sangat dominan memperlihatkan pengaruh agama dalam perjalan kalir politik mereka, seperti Nasir, Hamka, sampai Gus Dur dan Ma'ruf Amin sekarang.

Padahal kalau kita cermati lebih jauh gambaran kecil ini baru dalam ranah pengumpulan massa belum terlihat dalam prilaku para politisi ketika menjabat. Politisi yang tersandung berbagai macam ragam persoalan korupsi, kekerasan, dan sebagaimana merupakan orang yang beragama namun justru dalam segi etika politiknya sangat jauh dari persoalan demikian. Belum terlihat bagaimana agama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakannya.

Dalam persoalan politik dan agama ini, Miroljub Jevtic berpendapat, yaitu: ajaran untuk berperilaku sesuai dogma dan doktrin agama yang sudah digambarkan secara jelas dalam tek keagamaan. Pada posisi ini yang menjadi acuan adalah konsep sebuah negara, pemegang kekuasaan, legitimasi politik, political sovereignty (kekuasaan), otoritas politik, demokrasi, organisasi politik, pandangan tentang perdamaian dan peperangan (peace and war), toleransi agama, HAM, fundamentalisme, ekstrimisme agama, terorisme agama, peran sekularisme dll. Dibagian ini yang diperhatikan adalah bagaimana teks keagamaan mengakomodasi kajian kajian seperti ini; pratek keagamaan yang secara luar tidak menimbulkan efek politik namun di dalamnya mengandung konsekwensi politik. Hal ini terlihat seperti pelaksanaan haji, pemilihan paus, serta pemberian sanksi terhadap pendeta yang secara luar cuma memperlihatkan makna religious namun didalam mengandung konsekwensi politik; sikap partisipan politik terhadap kelompok kelompok keagamaan. Pada sisi ini yang menjadi pembahasan adalah bahaimana sebuah negara menyikapi hak hak keberagamaan seperti persoalan kebebasan ibadah, perayaan hari besar agama, kubu oposisi yang berbau agama; berbagai macam aksi sosial dan politik yang dari segi luarnya sama namun didalamnya mempunyai konsekwensi politik dan agama.

Persoalan etika dalam politik agama islam ini sudah dicontohkan oleh nabi Muhammad ketika berada di Madinah dahulu, dimana beliau berhasil membentuk sebuah masyarakat yang setara, berkeadilan, damai, serta toleransi yang dijunjung tinggi. Nilai ini hidup dalam

¹⁵ Gill, "Religion and Comparative Politics."

¹⁶ C Mundzir, "Dimensi Islam Dan Politik: Telaah Historis Atas Revolusi Iran 1979," *Jurnal Al-Hikmah*, 2020.

masyarakat majemuk yang dijadikan landasan etika politik ketika nabi Muhammad disana, sehingga terwujud masyarakat yang aman dan damai. Dalam perwujudan politik nabi di Madinah, beliau sangat gentor mempertahankan demokrasi dengan menjunjung prinsip musyawarah, amanah, transparansi, dan kejujuran yang menjadi model politik nabi.

Sehingga dapat kita simpulkan, bahwa kajian agama dalam keterkaitannya dengan politik bukanlah barang baru. Dimana sudah ada dari zaman dahulu, seperti organisasi pada masa pemerintahan Babilonia, Mesir kuno, serta Israel selalu dikaitkan dengan 'Tuhan'. Hal ini terjadi sebab legitimasi kekuasaan selalu berkaitan dengan legitimasi ketuhanan. Oleh sebab itu, fungsi sebuah pemerintahan dan kekuasaannya mau tidak mau akan tetap berhubungan dengan simbol ketuhanan atau agama.

Setelah perang dunia kedua, maka terjadi perkembangan terhadap hubungan ilmu politik dan agama. Miroljud Jevtic menyimpulkan; Pertama, pandangan yang diwakili oleh pilosof Prancis seperti Holbach, Helvetius, Diderot dan lain-lain, mereka melihat bahwa agama merupakan hasil dari ketertinggalan ekonomi dan perkembangan sosial yang belum tercerahkan. Sehingga pandangan ini tidak melihat agama sebagai subjek dari penelitian politik. Akibatnya, ahli politik menjelaskan proses, organisasi, regim serta partai politik benar benar menggunakan pendekatan kerangka berfikir materialistic an sich, dan sama sekali pengaruh agama meskipun mereka mengakui bahwa agama memberi pengaruh. Kedua, pandangan Alexis de Tocqueville abad 19 yang melihat kebalikan dari pendapat pertama, bahwa dia menilai agama bukan produk dari keterbelakangan ekonomi dan keterbelakangan masyarakat. Dia berargumentasi bahwa ketika ekonomi dan pendidikan meningkat peran agama justru semakin kuat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam survey yang di lakukan George Gallup terkait keagamaan masyarakat di Amerika, di mendapat data yang mencengangkan dalam 50 tahun terakhir, dimana terjadi peningkatan dalam kesadaran beragama masyarakat amerika, bahwa 36% masyarakat meyakini mereka dapat pengilan dari tuhan.¹⁷ Hal serupa juga terjadi di beberapa belahan dunia seperti Eropa dan Asia yang menyebabkan para ahli mulai memperhatikan kebangkitan agama dalam politik. Sehingga para ahli mulai memperbanyak penelitian mereka terkait hubungan kedua hal ini baik itu secara individu maupun kelembagaan sehingga melahirkan cabang ilmu baru yang bernama Religion and Politics dengan subjek kajian yang terus berkembang. Hal inilah yang membatah pandangan bahwa hubungan agama dan politik hanya sebuah mitos bahkan lebih mengarah pada penguatan pandangan Jevtic diatas tadi terkait hubungan agama dan politik.

Keadaan inilah yang sebenarnya menjadi sorotan dalam pangung perpolitikan, ketika hubungan agama dan politik menguat, maka bagian dari etika yang bersumber dari agama mejadi sorotan, sejauh mana pengaruh etika agama terhadap kebijakan sebuah politik. Sehingga sebagian kalangan sudah menolak konsep sekularisme sebagai betuk penerimaan terhadap pengaruh agama terhadap politik. Hal seperti ini terlihat dari argumentasi R Stark

¹⁷ Gallup George, "Religion in America, US Society and Values," *Electronic Journals of the US Information Agency* 2, no. 1 (2001).

yang menyerukan penghapusan konsep sekularisme dalam kelompok ilmu sosial dengan alasan bahwa konsep itu terlalu ideologis sehingga melahirkan banyak masalah karena dia tidak menemukan bukti terjadinya pergeseran sikap masyarakat dari beraga menjadi sekuler.¹⁸ Sedangkan Alexis memandang bahwa orang yang tidak beraga di Eropa sebagai sebab kebodohan mereka dibandingkan negara yang bebas seperti Amerika justru semangat dalam melihat persoalan agama. Hal ini dibuktikan oleh survey yang dilakukan oleh Tocqueville yang mengatakan bahwa terjadi peningkatan dalam kecendrungan orang amerika terhadap agama dengan meningkatnya jumlah jamaat gereja dibandingkan tahun tahun sebelumnya sebagai akibat meningkatnya komitmen mereka terhadap agama mereka. Namun di juga menemukan bahwa di Eropa dalam waktu yang panjang sikap anti agama atau sekuler di Eropa mengalami kegagalan sebab melemahnya jamaah lembaga keagamaan bukan karena minat keagamaan namun karena efek dari revolusi, bahkan bagian utara dan barat Eropa yang tergolong rendah karena efek dari moderasi.¹⁹ Argument yang kedua, bahwa tidak ditemukan lahirnya “atheism ilmiah” sebab masih tingginya keberagamaan masyarakat saat ini, walaupun mereka lemah dalam partisipasi keagamaan dilembaga secara rutin.

Salah satu yang gentor mengeluarkan argument terkait sekularisasi adalah Steve Bruce mengatakan bahwa klaim keemasan religiustas itu sangat subjektif. Sebab ketidak mau untuk hadir ke gereja pada abad pertengahan bukan sebab indikasi ketidak beragamaan mereka sebab mereka meyakini akan kekuatan supranatural. Sehingga hal ini harus dipandang sebagai masyarakat agama sebab pada masa ini, kepercayaan terhadap agama bercampur dengan kepercayaan terhadap animisme zaman itu sehingga mereka masih bisa disebut sebagai masyarakat yang beragama seperti yang terjadi belahan wilayah lain.²⁰ Namun, yang harus diperhatikan juga ketika tesis tentang sekularisme diyakini, apakah hal ini juga berlaku bagi golongan ahli sains. Sebab temuan ilmiah hari ini tidak menunjukkan bahwa terjadi pertentangan antara agama dengan sains karena masih banyak kalangan saintis justru dari segi tingkat keagamaannya tergolong tinggi. Salah satu wilayah yang menguat terkait berkembang ateisme adalah Uni Soviet yang berdampak pada Eropa bagian timur hal ini tergambar dalam pendapat Andrew Greeley yang mengatakan bahwa “tidak ada dalam rentang sejarah yang memperlihatkan sebuah kesepakatan bersama untuk menghilangkan agama seperti yang dilakukan oleh kelompok komunisme ateis yang berargument bahwa proses sekularisasi merupakan proses yang tidak bisa dihindarkan sebagai sebab akan terhapusnya

¹⁸ David Martin, “The Secularization Issue: Prospect and Retrospect,” *The British Journal of Sociology* 42, no. 3 (1991), <https://doi.org/10.2307/591190>.

¹⁹ Darryl G. Hart, “The Churching of America, 1776–1990: Winners and Losers in Our Religious Economy; By Roger Finke and Rodney Stark New Brunswick, Rutgers University Press, 1992. 339 Pp. \$22.95,” *Theology Today* 50, no. 3 (1993), <https://doi.org/10.1177/004057369305000329>.

²⁰ Eamon Duffy, *THE STRIPPING OF THE ALTARS: Traditional Religion in England, 1400–1580 New Edition*, The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England, 1400–1580 New Edition, 2022.

agama”.²¹ Namun kebangkitan agama terjadi pasca kehancuran soviet sebagaimana yang digambarkan oleh Mary Douglas tahun 1982 bahwa “Tak ada seorangpun yang menyadari sebelumnya akan bentuk kebangkitan agama-agama tradisional. Menurut beberapa literatur, perubahan keagamaan (agama) di zaman modern terjadi hanya dalam dua cara –jatuhnya gereja Kristen tradisional (atau apapun bentuk ekspresi keagamaan masyarakat), dan lahirnya sekte-sekte agama baru. Tak ada seorangpun yang memberikan perhatian kepada agama-agama tradisional dengan penuh vitalitas yang menginspirasi revolusi politik dalam skala luas. Kebangkitan gerakan Katolik yang eksplisit di Polandia, yang membuat kekaguman yang dalam dari Barat, sama tidak terprediksinya seperti kebangkitan kaum gereja fundamentalis di Amerika.

FUNGSI ETIKA BERBASIS AGAMA DALAM KEHIDUPAN POLITIK

Posisi kajian politik yang merupakan sebuah disiplin tunggal yang selalu dapat sorotan di universitas sejak sekian abad lalu pasca revolusi inggris. Dimana masa ini ilmu sosial terus memperlihatkan perkembangan. Sampai pada tahun 1872 berdiri L'Ecole Libre des sciences Politiques yang akhirnya berganti nama dengan L- Institut d' Etudes Politiques.²² Kajian yang banyak dibahas terkait bentuk negara, model pemerintahan, partai politik dan lain sebagainya.

Pembahasan terkait politik ini jika kita telusuri lebih dalam sebenarnya sudah ada masa Aristoteles, Plato, Ibnu Rusdy, al Ghazali dan sebagainya. Aristoteles memandang bahwa etika dan politik sangat berhubungan yang dapat dilihat dalam Nicomachen Ethics. Etika yang di gaulkan oleh aristoteles adalah etika kebaikan, bahwa setiap aktiveitas harus yang dilakukan harus berujung pada kebaikan sebagai tujuan kesempurnaan hidup. Sehingga aristoteles memandang bahwa etika dan politik merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Sedangkan Plato juga menekankan pada etika kebaikan sehingga untuk pencapaian itu dia mengharuskan seorang pemimpin itu harus dari orang yang mengetahui tentang kebajikan sehingga mampu menegakan kebenaran dan kebaikan.²³

Sedangkan ibnu rusdy melihat etika sebagai pondasi politik, sehingga dia sangat menganjurkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki karakter; mencintai pengetahuan, tidak suka mengumbar hawa nafsu, dan tidak suka menumpuk harta. Karakter ini sangat ditekankan oleh ibnu rusdy untuk seorang pemimpin.²⁴ Memang karakter ini nanti akan melahirkan kebaikan demi kebaikan dalam pengambilan kebijakan oleh seorang pemimpin.

Al Ghazali memandang politik dan etika sama dengan tokoh sebelumnya, bahwa etika merupakan sesuatu yang sangat urgent untuk ditumbuh kembangkan. Sehingga dalam

²¹ Mirian Escobar Valencia, “Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions, John W. Creswell Los Angeles: SAGE, 2013,” *Estudios de La Gestión*, 2020.

²² Miroljub Jevtic, “Political Science and Religion,” n.d.

²³ Konrad Kebung, “Estetika Eksistensi Michel Foucault: Kritik Dan Solusi Alternatif Atas Radikalisme Dan Ekstremisme,” *MELINTAS* 34, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.26593/mel.v34i1.3084.35-59>.

²⁴ Abu Walid Ibnu Ruysd, *A-Arûri Fi as-Siyâsah* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiah, 1998).

pandangan etika politiknya dia sangat menekankan pentingnya sikap adil dan amanah serta amar makruf dalam berpolitik.²⁵

Tokoh tokoh di atas merupakan bagian kecil dari para tokoh yang memandang pentingnya etika dalam perpolitikan. Sehingga gambaran ini menunjukkan bahwa etika sangat penting dalam perpolitikan supaya lahirnya sebuah pemerintahan yang baik dan masyarakat makmur.

Survey memperlihatkan posisi Indonesia menduduki 34 dalam indek negara terkorup, dalam tingkat negara termakmur pun diposisi belakang bahkan keamananpun sangat rendah di Indonesia. Yang paling mengejutkan dari beberapa data itu, posisi Indonesia dengan peringkat negara terkorup justru 87% adalah sarjana para pelakunya. Artinya disini ada yang salah entah dengan pendidikan atau dengan kultur masyarakat kita yang sudah menganggap biasa dengan korupsi ini.

Kita lihat dalam perjalanan bangsa kita, pelaku kejahatan dalam bidang politik pada umumnya adalah orang-orang terdidik dan beragama. Tak jarang juga kita temui mereka pada umumnya telah berulang kali pergi ibadah haji atau umrah namun sialnya korupsi tak hilang dari dagingnya. Permasalahan ini membuktikan bahwa ada penyakit akut bangsa ini dalam persoalan etika. Karena pendidikan tinggi tidak akan menjamin etika seseorang akan lebih baik. Bagi penguasa memberikan rasa cinta serta berbuat kebaikan terhadap rakyat merupakan sebuah keharusan sehingga menjadi pemimpin yang dibanggakan. Sebaliknya jika pemimpin harus memimpin dengan tangan besinya, itu merupakan sebuah sikap amoral dalam penguasaan dan sangat dibenci oleh agama. Persoalan etika dalam lingkup berbangsa dan bernegara yang didalamnya tak bisa lepas dari pelaku politik dan partisipan politik, makanya persoalan etika harus terlaksana dan terus tumbuh sehingga penguasa beretika rakyatpun juga begitu.

Ali bin Abi Thalib pernah berpidato didepan rakyatnya; “Demi Tuhan, sesungguhnya berat dugaan saya, bahwa musuh-musuh itu akan menang mengalahkan kamu karena moral mereka yang baik, yaitu mereka bersatu padu walaupun di dalam kesesatan, sedangkan kamu terpecah belah dalam kebenaran.”²⁶ Para pemegang kekuasaan sangat dituntut untuk berita baik seperti berperilaku adil diantara masyarakat dan menahan diri mereka dari perilaku jahat yang dapat merusak dirinya dan bangsa ini. Tuntutan etika yang bagus ini sangat baik bagi perkembangan bangsa kedepannya. Jika perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang baik ini terwujud, maka tidak akan kita temui lagi istilah pembohongan publik, penyimpangan laporan, punggutan liar, kekerasan, pelecehan dan sebagainya yang selama ini sangat menjamur di ranah kekuasaan yang sebagian besar adalah politikus yang sempat mengumbar janji sebelum pemilihan.

²⁵ Al-Ghazali, *Al-Tibr Al-Masbûk Fî Nasîhat Al-Mulk* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1988).

²⁶ Nur Cholis, “Pemikiran Zainal Abidin Ahmad Tentang Konsepsi Negara Islam,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.116-140>.

Keadaan ini akan langgeng jika perilaku penguasa terhadap rakyat dalam memelihara urusan-urusan secara bersama-sama dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai etika yang tinggi. Namun diketahui bahwa keruntuhan dunia bergantung kepada penguasa, jika penguasa adil maka dunia akan makmur dan rakyat merasa aman.²⁷ Kalau kita cermati yang menjadi salah satu penyebab merosotnya etika dan moral bangsa adalah masyarakat tidak menjalankan agama mereka dengan baik. Sebab semua agama sudah pasti menjunjung nilai moral yang baik sehingga tidak pantaslah agama yang disalah namun sikap pemeluknya yang salah.²⁸ Agama selalu menawarkan nilai-nilai keimanan dan tatanan nilai moral yang tinggi sehingga akan membentuk kepribadian yang bagus. Sehingga jika ini sudah dimiliki oleh masing-masing penguasa secara otomatis akan teraplikasi dalam dunia kerja mereka yang berakibat baiknya sebuah lembaga negara.²⁹

Begitu pentingnya etika terhadap humanisme, oleh sebab itu para politikus yang akan mengarah pada posisi kekuasaan sangat diharuskan memperhatikan ranah etika ini. Jangan justru demi sebuah kekuasaan, etika justru dibuang ataupun dikesampingkan. Seperti yang terjadi terhadap Novel Baswedan yang dianiaya untuk melindungi sebuah kedudukan, Gus Dur yang harus ditumbangkan demi mempertahankan kekuasaan³⁰ dan banyak lagi kasus lain yang kita lihat dalam perilaku politikus yang diberitakan hanya aksi balas dendam dalam pertarungan kekuasaan, jebak menjebak untuk saling menjatuhkan, hina menghina untuk mendapatkan pangung sampai pada pembagian proyek setelah kekuasaan yang tidak lagi memperhatikan keadilan dan kemakmuran rakyat.

Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita mengamati syarat pemerintahan yang efektif menurut Ibnu Arabi ini, seperti pejabat negara yang diangkat merupakan pribadi yang mempunyai integritas tinggi; usulan yang didengarkan harus diseleksi dan berasal dari orang yang terpercaya; dalam hal-hal yang rahasia harus berbicara dengan orang yang betul-betul dapat dipercaya; tidak memandang remeh rekan kerja sesama pejabat; serta tidak memberikan sebuah tugas pada orang yang bodoh sehingga menimbulkan kerusakan pada urusan tersebut.³¹ Sedangkan Al-Farabi menawarkan bahwa calon penguasa yang sudah pasti berasal dari politikus ini harus memiliki watak yang bersih yang bisa didapat lewat belajar dan berlatih sehingga mampu mensejalkan hati dan pikirannya serta tidak meninggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan nabi.³² Sedangkan di sisi Ibnu Taymiyah, dalam persoalan etika politik dia menekankan perilaku amanah dalam memerintah, adil ketika menghukum, taat kepada Allah, rasul dan ulil Amri serta penyelesaian semua permasalahan kepada Allah.

²⁷ Al-Ghazali, *Al-Tibr Al-Masbûk Fî Nashîhat Al-Mulk*.

²⁸ Asep Bambang Hermanto, "Etika Berdemokrasi Pancasila Dalam Konstestasi Politik Di Era Digitalisasi," *SELISIK* 6 (2020).

²⁹ Bertolomes Bolong, "Etika Politik Ulama," *Millah: Journal of Religious Studies* 18, no. 1 (2018).

³⁰ Virdika Rizky Utama, *Menjerat Gus Dur*, II (Jakarta: PT. NUmedia Digital Indonesia., 2019).

³¹ Solechan Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

³² Tofa Fidyansyah and Siti Ngainnur Rohmah, "Kriteria Calon Pemimpin Negara Dan Mekanisme Pencalonannya Di Negara Republik Indonesia Dalam Pandangan Fiqih Siyasah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20254>.

Padang beliau ini berpijakan pada surat an Nisa ayat 58-59 sebagai pengembangan pemahamnya terkait etika seorang politikus.³³ Dari keempat prinsip yang beliau sebutkan ini, beliau menekankan pada pelaksanaan amanah dan adil sebagai pondasi politik yang harus ada.³⁴ Kenapa beliau sangat menekankan pada prinsip ini, sebab amanah sangat berkaitan dengan kekuasaan dan harta. Amanah dalam melaksanakan tugas sehingga memberikan penyelesaian dengan sebaik baiknya sebagai bentuk dari sebuah tanggungjawab yang diterima. Sedangkan amanah dalam persoalan harta berkaitan dengan proposional dalam mengelola, transparan dalam pembukuan serta bisa dipertanggungjawabkan supaya tercapainya kemakmuran rakyat.

Hal ini memang sangat urgent dalam perpolitikan untuk mencapai humanisme religius, sebab inilah yang menjadi cikal bakal korupsi itu terjadi. Dalam melihat persoalan ini Ibnu Taymiyah sangat melarang perilaku penguasa yang merampas atau mengambil harta rakyatnya. Hal seperti ini sekarang yang sangat banyak dilakukan, dimana berbagai macam bantu yang sudah diperuntukan untuk kemakmuran rakyat justru digelapkan oleh sebagian politikus yang berwenang dibidang itu. Kemudian beliau juga tidak membolehkan seorang penguasaan menerima hadiah dari siapapun, hal ini justru menjadi sebuah budaya dalam sebagian masyarakat kita. Baik posisi politikus sebagai penerima maupun rakyat yang mengasih, padahal hadis ini selalu berkait dengan pemberian yang dilakukan oleh politisi tersebut dalam kewenangan kerjanya seperti pemberian jatah proyek, membantu dalam mendapatkan kerja, pengurusan naik pangkat, bahkan dalam hal pemberian bantuan yang memang sudah diperuntukan untuk dia. Kemudian beliau juga menyorot terkait harta sita yang yag harus digunakan untuk kepentingan umum karena tidak ada lagi pemiliknya, hal ini sebagian sudah terlaksana dimana kekayaan para koruptor yang berhasil diamankan dikembalikan kekas negara namun sebagian ada juga yang tidak tau entah kemana bahkan ada rumor tanpa data dari celotehan masyarakat awam bahwa barang sita tersebut sebagian dibagi bagi oleh segelintir pihak. Dalam hal pembangunan harus mengutamakan kemashlahatan sehingga melahirkan humanisme secara umum serta meminimalkan kerusakan, hal ini dapat kita lihat dalam proses pembangunan inprastruktur masyarakat yang tidak asal jadi saja namun tidak memperhatikan keadaan lingkungan dan kualitas bangunan sehingga tidak menjadi proyek mangkrak nanti. Hal hal ini sangat signifikan dalam etika melaksanakan tugas oleh para politikus sehingga tidak merusak moral para politisi tersebut sehingga apa yang dikampanyekan waktu sebelum menduduki jabatan betul dilaksakannya ketika sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat.³⁵ Terkait prinsip keadilan beliau memandang sebagai prinsip mutlak yang tidak boleh tidak ada sehingga beliau

³³ M. Arskal Salim GP, *Etika Intervensi Negara, Perspektif Etika Politik Ibn Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999).

³⁴ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyâsah Al-Syar'îyyah Fî Ishlâh Al-Râ'i Wa Al-Ra'îyyah* (Kairo: al-Mathba'ah al-Salafi yah, 1387).

³⁵ Taymiyyah.

memandang pemimpin yang kapir tapi adil lebih baik dari seorang muslim yang zalim.³⁶ Jadi etika politik ini merupakan sebuah nilai yang harus ditumbuh suburkan, karena posisi etika ini tergolong pada ranah humanisme religius sehingga berhubungan dengan tindak tanduk perilaku antara manusia dengan manusia yang berlanjut pada tuhan.

Kesimpulan

Pentingnya etika yang berasal dari agama dalam percaturan politik tidak dapat diingkari. Bahkan etika ini sangat berperan dalam mengantarkan kesempurnaan keimanan seseorang. Maka sudah seharusnya, untuk mencapai humanisme religius, persoalan etika menjadi persoalan mutlak yang harus dirujuk dalam perilaku para politisi. Oleh sebab itu, sudah seantasnya para ahli melihat dan memperdalam kajian terkait hubungan antara agama dan politik ini sebab disatu sisi agama akan mentuntun seseorang pada nilai nilai yang bagus menuju ilahi sehingga ketika nilai ini hidup dan subur dalam dirinya maka ketika posisinya berada dalam dunia politik kebiasaan tersebut akan terbawa sehingga akan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh para politisi tersebut nanti.

Etika yang paling penting melekat pada politisi supaya tercapainya humanisme religious, yaitu adil, jujur, bertanggung jawab dan berpengetahuan luas. Jika etika ini terpenuhi dan hidup dalam diri seorang politisi maka persoalan yang dapat mengancam kemakmuran dan kesengsaaan masyarakat yang berada dibawah kuasa seorang politisi dapat terhindarkan sehingga akan melahirkan masyarakat yang memiliki kualitas humanism yang sempurna untuk membentuk sebuah peradapan yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. *Al-Tibr Al-Masbûk Fî Nasîhat Al-Mulk*. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1988.
- Bolong, Bertolomes. "Etika Politik Ulama." *Millah: Journal of Religious Studies* 18, no. 1 (2018).
- Cholis, Nur. "Pemikiran Zainal Abidin Ahmad Tentang Konsepsi Negara Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.116-140>.
- Duffy, Eamon. *THE STRIPPING OF THE ALTARS: Traditional Religion in England, 1400–1580 New Edition. The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England, 1400–1580 New Edition*, 2022.
- Fidyansyah, Tofa, and Siti Ngainnur Rohmah. "Kriteria Calon Pemimpin Negara Dan Mekanisme Pencalonannya Di Negara Republik Indonesia Dalam Pandangan Fiqih Siyasah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20254>.
- George, Gallup. "Religion in America, US Society and Values." *Electronic Journals of the US Information Agency* 2, no. 1 (2001).
- Gill, Anthony. "Religion and Comparative Politics." *Annual Review of Political Science* 4 (2001). <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.117>.

³⁶ GP, *Etika Intervensi Negara, Perspektif Etika Politik Ibn Taimiyah*.

Etika Politik Sebagai Jalan Penyempurnaan Humanisme Religijs – Muhammad Danil dan Melia Rosa

- GP, M. Arskal Salim. *Etika Intervensi Negara, Perspektif Etika Politik Ibn Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.
- Greeley, Andrew. "A Religious Revival in Russia?" *Journal for the Scientific Study of Religion* 33, no. 3 (1994). <https://doi.org/10.2307/1386689>.
- Hart, Darryl G. "The Churching of America, 1776–1990: Winners and Losers in Our Religious Economy; By Roger Finke and Rodney Stark New Brunswick, Rutgers University Press, 1992. 339 Pp. \$22.95 ." *Theology Today* 50, no. 3 (1993). <https://doi.org/10.1177/004057369305000329>.
- Hermanto, Asep Bambang. "ETIKA BERDEMOKRASI PANCASILA DALAM KONSTESTASI POLITIK DI ERA DIGITALISASI." *SELISIK* 6 (2020).
- Huberman, Matthew B.Miles dan A. Michael. *Qualitative and Analysis*. Second edi. London: Sage Publication inc, 1994.
- Inglehart, Ronald F. *Religion's Sudden Decline What's Causing It, and What Comes Next*. England: Oxford University Press, 2021.
- Kebung, Konrad. "Estetika Eksistensi Michel Foucault: Kritik Dan Solusi Alternatif Atas Radikalisme Dan Ekstremisme." *MELINTAS* 34, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.26593/mel.v34i1.3084.35-59>.
- Martin, David. "The Secularization Issue: Prospect and Retrospect." *The British Journal of Sociology* 42, no. 3 (1991). <https://doi.org/10.2307/591190>.
- Mundzir, C. "Dimensi Islam Dan Politik: Telaah Historis Atas Revolusi Iran 1979." *Jurnal Al-Hikmah*, 2020.
- Purwanto, Edi. "Peran Ekonomi, Politik, Dan Sosial Dalam Kekerasan Atas Nama Agama." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30648/dun.v4i1.204>.
- Ruysd, Abu Walid Ibnu. *A-Arûri Fi as-Siyâsah*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiah, 1998.
- S., Charles. *Religion Liebman, Democracy and Israeli Society*. New York: Routledge, 2017.
- Silitonga, Novance. "POTENSI SISTEM PEMILU MEMUNCULKAN PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA." *Jurnal Communitarian* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.231>.
- Solechan, Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Taymiyyah, Ibn. *Al-Siyâsah Al-Syar'iyah Fi Ishlâh Al-Râ'i Wa Al-Ra'Iyyah*. Kairo: al-Mathba'ah al-Salafi yah, 1387.

Utama, Virdika Rizky. *Menjerat Gus Dur*. II. Jakarta: PT. NUmedia Digital Indonesia., 2019.

Valencia, Mirian Escobar. "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions, John W. Creswell Los Angeles: SAGE, 2013." *Estudios de La Gestión*, 2020.